



**RENCANA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN  
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
<b>2</b>	<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	√			
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√			
<b>3</b>	<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	√			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	√			
<b>4</b>	<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	√			
<b>5</b>	<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	√			

Bandar Lampung, Juli 2024  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Bandar Lampung,

**Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741007 200501 1 006

Diverifikasi :		2024	Tanda Tangan
1	(Dr.Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si)		
	Kabid Perekonomian dan SDA		
2	(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)		
	(Fungsional Perencana)		

Mengetahui,  
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan  
Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19700218 199303 2 002

**FORMULIR E.70**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2024  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Bandar Lampung,

**Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741007 200501 1 006

Diverifikasi :		2024	Tanda Tangan
1	<b>(Dr.Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si)</b>		
	Kabid Perekonomian dan SDA		
2	<b>(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)</b>		
	(Fungsional Perencana)		

Mengetahui,  
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan  
Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19700218 199303 2 002

**FORMULIR E.71**  
**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi :		2024	Tanda Tangan
1	<b>(Dr.Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si)</b> Kabid Perekonomian dan SDA		
2	<b>(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)</b> (Funsional Perencana)		

Bandar Lampung, 2024  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700218 199303 2 002



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, walaupun mungkin masih banyak kekurangan didalam penyajiannya.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun kegiatan alternatif atau baru, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan, dan pagu indikatif dan prakiraan maju yaitu kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Renja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Bandar Lampung,

2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Dr. M.NUR RAM'DAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA**  
NIP. 19741007 200501 1 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.3
1.3 Maksud dan Tujuan	I.6
1.4 Sistematika Penulisan	1.6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II.19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II.22
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III.1
3.3 Program dan Kegiatan	III.2



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah IV.1

BAB IV PENUTUP V.1

**LAMPIRAN**

- Bagan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
- Tabel T.C-29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
- Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 BKAD Kota Bandar Lampung.



## **Daftar Grafik**

	Hal.
Grafik 2.1 Pagu/Anggaran Dan Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung di Program Prioritas TA 2023	II.10
Grafik 2.2 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 Terhadap Kegiatan di Program Prioritas BKAD Kota Bandar Lampung	II.17



## Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	II.2
Tabel 2.2	Pagu Prioritas Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, Anggaran Dan Realisasi Anggaran	II.9
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Program Prioritas BKAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023	II.11



# LAMPIRAN

*Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung*  
Tahun 2025





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG.**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan hal tersebut pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD memuat program dan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun kegiatan alternatif atau baru, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan, dan pagu indikatif dan prakiraan maju yaitu kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan sasaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan;
2. Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah;
3. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK;



5. Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Renja Rencana Kerja (Renja) BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja (BKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026;
20. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
21. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.



### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKAD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan BKAD Kota Bandar Lampung dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BKAD Kota Bandar Lampung selama Tahun 2025.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD.**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BKAD Kota Bandar Lampung, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung. BKAD memiliki indikator sasaran seperti yang tercantum pada Renstra BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.



Tabel 2.1 Indikator Sasaran BKAD Kota Bandar Lampung tahun 2021 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	SATUA N	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.		Tepat kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen						100
			Tepat penatausahaan keuangan daerah	Persen						100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Skor	79,71-79,80	79,81-79,85	79,86-79,90	79,91-80,00	80,01-80,10	80,11-80,20	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100	100	100	100	100	100
		Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		Meningkatnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen						100
		Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-	Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca	Persen	100	100	100	100	100	100



		Undangan	Pemerintah Kota							
--	--	----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BKAD Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKAD Kota Bandar Lampung selama Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



**Indikator Kinerja RPJMD :**

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK;

**Indikator Kinerja Program Renstra :**

1. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah;
3. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P
4. Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan;
5. Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah;
6. Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD;

**Indikator Kinerja Kegiatan Renja :**

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas;
2. Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib
3. Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel
4. Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD



7. Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor
8. Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD
9. Inventaris kantor yang tersedia

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pengelolaan Keuangan daerah:

1. Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
2. Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
3. Opini BPK atas LKPD;
4. Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat;
5. Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah;

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2024

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
5. Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD



6. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
8. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
9. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
10. Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
11. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
12. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan
14. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
15. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
16. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
17. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
18. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
19. Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu
20. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
21. Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
22. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan



23. Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan
24. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
25. Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan
26. Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
27. Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya
28. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
29. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
30. Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
31. Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun
32. Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
33. Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
34. Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran
35. Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
36. Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
37. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
38. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD



39. Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
40. Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
41. Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
42. Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
43. Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
44. Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
45. Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi
46. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota



47. Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
48. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota
49. Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina
50. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah
51. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah
52. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
53. Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak
54. Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah
55. Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
56. Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota
57. Jumlah standar harga yang disusun
58. Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah
59. Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah
60. Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah
61. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
62. Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah



63. Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
64. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

## 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2023 Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung (terlampir).**

### ó Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Periode Tahun Anggaran 2023, Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung melaksanakan 2 (dua) *Program Prioritas* yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2 berikut :

*Tabel 2.2 Program Prioritas BKAD Kota Bandar Lampung T.A 2023, Anggaran dan Realisasi Anggaran.*

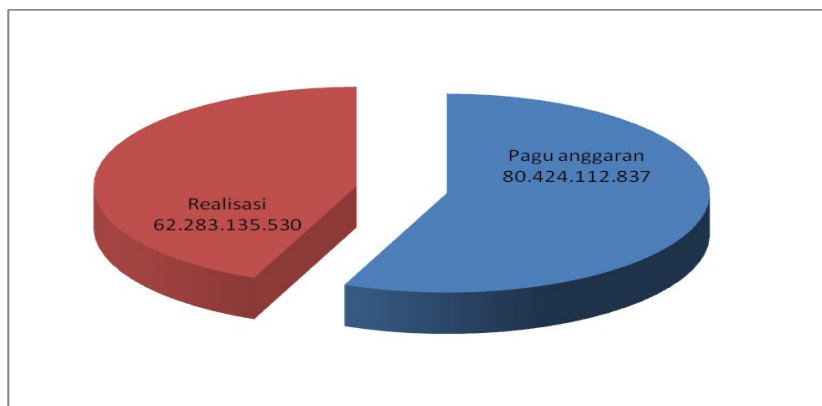
No.	Program	Tahun Anggaran 2023		Persentase (%) Realisasi
		Pagu /Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp.)		
1	2	3		4
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	80.424.112.837,00	62.283.135.530,00	77,44%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.789.369.433,00	2.360.688.269,00	84,63%



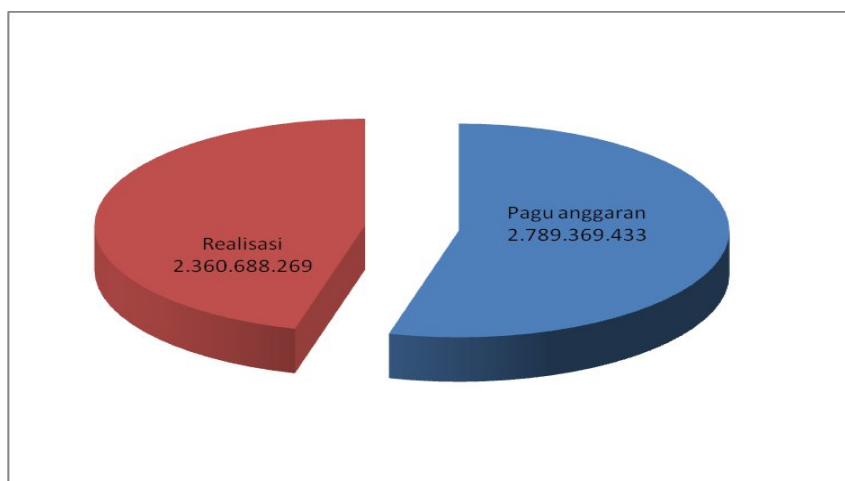
Dari Tabel 2.2 dapat dijabarkan/diuraikan bahwa Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Anggaran sebesar **Rp.80.424.112.837,00** (terbilang Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), Realisasi **Rp.62.283.135.530,00** (terbilang Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar **77,44%**. Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Anggaran sebesar **Rp. 2.789.369.433,00** (terbilang Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), Realisasi **Rp. 2.360.688.269,00** (terbilang Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar **84,63%**.



**Grafik 2.1 Pagu/Anggaran dan Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung di Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023**



**Grafik 2.2 Pagu/Anggaran dan Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung di Program Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2023**





Program prioritas Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung T.A 2023 didukung dengan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

pencapaian kinerja Realisasi Anggaran dapat dilihat dalam uraian pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Program Prioritas BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD		21.565.977.975,00	22,26%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P			
		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	5.007.566.993,00	4.314.365.026,00	86,16
1	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	723.652.863,00	663.151.000,00	91,64
2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	354.431.669,00	311.767.500,00	87,96
3	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	582.509.483,00	566.915.350,00	97,32
4	Koordinasi dan penyusunan peraturan	Jumlah peraturan daerah tentang	761.415.186,00	673.355.077,00	88,43

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung  
Tahun 2025



No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD			
5	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	467.797.892,00	417.488.875,00	89,25
6	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1.366.672.778,00	942.400.244,00	68,96
7	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	751.087.122,00	739.290.050,00	98,43
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	<b>5.177.054.509,00</b>	<b>3.980.453.500,00</b>	<b>72,84%</b>
8	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	2.758.199.705,00	2.070.552.700,00	75,07%
9	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	973.754.000,00	636.243.050,00	65,34%
10	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	326.773.100,00	240.673.154,00	73,65%
11	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan	334.001.912,00	255.642.868,00	76,54%

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung  
Tahun 2025



No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)			
12	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	93.327.538,00	92.380.919,00	98,99%
13	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	540.325.000,00	424.093.900,00	83,33%
14	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	438.392.900,00	260.866.909,00	59,51%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK atas LKPD</b>	<b>890.613.022,00</b>	<b>615.819.350,00</b>	<b>69,15%</b>

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung  
Tahun 2025



No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	191.455.500,00	161.162.050,00	84,18%
16	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	139.080.597,00	97.542.100,00	70,13%
17	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	187.035.000,00	165.513.700,00	88,49%
18	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	246.306.300,00	161.464.700,00	65,55%
19	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	52.771.250,00	600.000,00	1,14%
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat</b>	<b>60.598.000.000,00</b>	<b>21.666.318.952,00</b>	<b>35,75%</b>
20	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	50.000.000,00	47.930.600,00	95,86%
21	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan	11.000.000.000,00	6.266.085.152,00	56,96%

Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung  
Tahun 2025



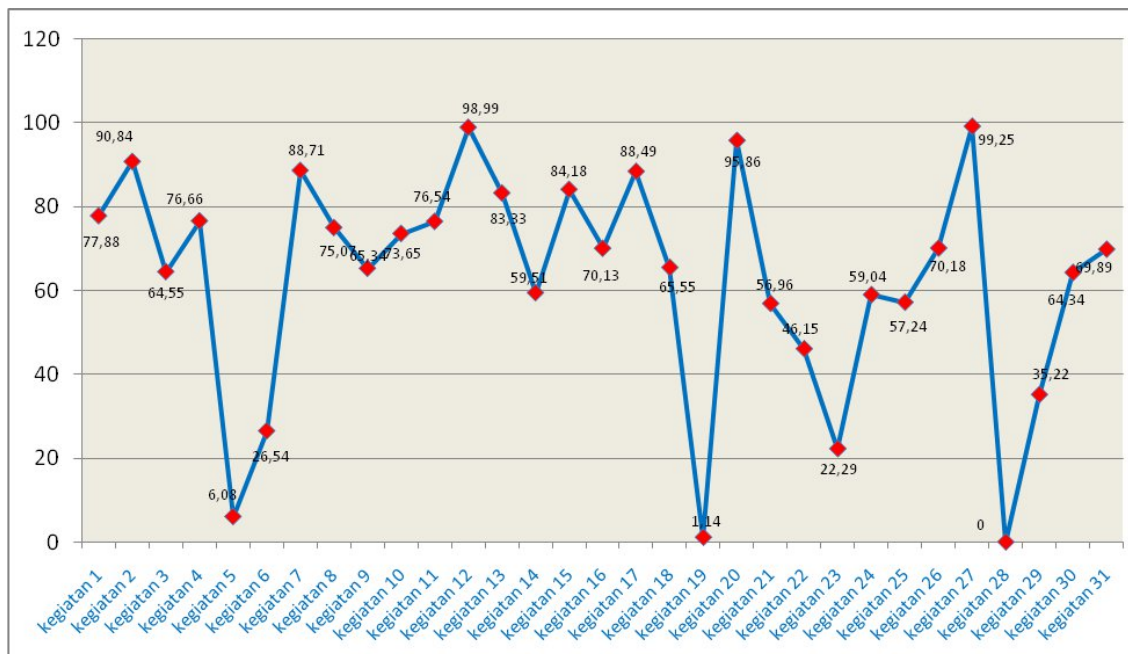
No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pinjaman pemerintah daerah	pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah			
22	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	18.048.000.000,00	8.329.940.700,00	46,15%
23	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	31.500.000.000,00	7.022.362.500,00	22,29%
	<b>Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>1.647.725.245,00</b>	<b>1.083.341.450,00</b>	<b>65,75%</b>
24	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	283.600.000,00	167.427.500,00	59,04%
25	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	319.862.000,00	183.100.950,00	57,24%
26	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	1.044.263.245,00	732.813.000,00	70,18%
	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah</b>	<b>2.029.455.000,00</b>	<b>1.112.071.829,00</b>	<b>54,80%</b>
		<b>Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD</b>			



No.	Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	P a g u	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Anggaran (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah</b>	<b>2.029.455.000,00</b>	<b>1.112.071.829,00</b>	<b>54,80%</b>
27	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	148.880.000,00	148.415.000,00	99,25%
28	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	60.003.125,00	0,00	0,00
29	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	875.241.875,00	308.240.780,00	35,22%
30	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	353.541.875,00	227.483.100,00	64,34%
31	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	590.668.125,00	412.840.654,00	69,89

Realisasi anggaran pada tahun 2023 terhadap kegiatan diprogram prioritas yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Bandar Lampung dapat digambarkan pada grafik 2.2.

*Grafik 2.3 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 Terhadap Kegiatan Diprogram Prioritas BKAD Kota Bandar Lampung.*



Pada Grafik diatas terlihat bahwa *realisasi anggaran yang terlihat sangat rendah* pada kegiatan :

- Pada kegiatan ke 5 yaitu koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran dengan realisasi anggaran 6,08% dikarenakan kegiatan tersebut adalah dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yang mana baru akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Pada kegiatan ke 19 yaitu koordinasi dan Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota dengan realisasi anggaran 1,14% dikarenakan kegiatan tersebut adalah 33 (tiga puluh tiga) laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas selama 1 tahun yang mana baru akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Pada kegiatan ke 28 yaitu koordinasi dan Penatausahaan barang milik daerah dengan realisasi anggaran 0,00% dikarenakan kegiatan



tersebut adalah 1 (satu) Laporan evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada OPD selama 1 tahun yang mana baru akan dilaksanakan di triwulan 4.

- **Perkiraan Capaian Tahun 2024**

Tahun Anggaran berjalan (Tahun 2024) BKAD Kota Bandar Lampung melaksanakan 2 (dua) program prioritas /program utama dengan dukungan anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 77.246.122.554,00 terbilang *Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 2.680.558.468,00 terbilang *Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah* diharapkan keberhasilan pencapaian kinerja output dan outcome minimal sama dengan Tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BKAD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- **Strategi**

- a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.



- b. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur melalui pembinaan sesuai tuntutan kebutuhan kemampuan SDM secara bertahap.
- c. Peningkatan kualitas penyusunan APBD dengan bersinergi dengan OPD Perencanaan dan Badan Anggaran Legislatif (DPRD) guna mewujudkan APBD yang partisipatif, tepat waktu dan tepat kualitas.
- d. Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah melalui pembinaan dari Pihak APIP daerah, Pemerintah Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan dan berkoordinasi dengan Akademisi, Organisasi Akuntansi, serta Pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh evaluasi yang bermanfaat guna mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang beropinionkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan kaidah akuntansi berbasis Akrual.
- e. Meningkatkan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD bersama Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Barang melalui pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala.
- f. Mengembangkan Sistem dan Data Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terpadu dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi serta mengembangkan sistem melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

## **ó Kebijakan**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta Kualitas SDM Aparatur.



2. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penatausahaan Keuangan Daerah.
4. Penyusunan Pertanggung jawaban Laporan Keuangan Daerah.
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah.
6. Peningkatan dan Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKAD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bandar Lampung dalam pelayanannya yaitu sebagai perumus kebijakan teknis dan sebagai pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya pelayanan tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

### **2.2.1 Pelayanan sebagai Perumus Kebijakan Teknis**

Sebagai Perumus Kebijakan Teknis dibidang keuangan dan aset daerah BKAD Kota Bandar Lampung berperan dalam hal :

Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman, dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;

1. Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis serta pembinaan atas penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan penyusunan petunjuk teknis atas perancangan anggaran



keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4. Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.

### **2.2.2 Pelayanan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Sebagai pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, BKAD berperan dalam :

1. Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan, penyediaan dukungan dan kerja sama dengan satuan unit organisasi/instansi lain, Pemerintah Pusat dan Provinsi di bidang keuangan daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan daerah pemerintah;
3. Melakukan pembinaan melalui segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Pembinaan atas pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD;



5. Melaksanakan penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
7. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyajian informasi keuangan daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Memberikan pelayanan kegiatan kesekretariatan di lingkungan BKAD meliputi pembinaan dan evaluasi atas kepegawaian/personil, keuangan, dan kegiatan umum lainnya

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKAD**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Aparat Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan melalui Sistem Informasi yang berbasis teknologi dan informasi yang canggih.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang Pelayanan Publik.
4. Tuntutan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Lampung memerlukan pendanaan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks sehingga diperlukan inovasi dan



kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD.

5. Inventarisasi Barang Milik Daerah secara administrasi masih terdapat yang belum sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
6. Laporan hasil pemeriksaan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung memperoleh WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada Tahun 2023 yang sebelumnya WTP. BKAD sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk dapat meningkatkan menjadi WTP tersebut seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Implementasi transaksi non tunai dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersih, transparan dan akuntabel.

#### **2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.







## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKAD Kota Lampung Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **Tujuan**

1. Tersusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

##### **Sasaran**

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

BKAD Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 1 (satu) Program Non Urusan /Rutin dan 2 (dua) Program Urusan Wajib /Prioritas, sebagaimana uraian berikut :

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

##### **/ Kota didukung oleh 7 (tujuh) Sub kegiatan :**

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
5. Administrasi umum perangkat daerah;
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

#### **Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah didukung 7 (tujuh) sub kegiatan :**

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



4. Koordiansi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordiansi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung 3 (tiga) sub kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung 2 (dua) sub kegiatan :**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

**Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah didukung 9 (sembilan) sub kegiatan :**

1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan peralatan rumah tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik kantor



5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi kunjungan tamu
8. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
9. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung 2 (dua) sub kegiatan :**

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

**Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 2 (dua) sub kegiatan :**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah didukung 4 (empat) sub kegiatan :**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya



4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

**Program Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 5 (lima) kegiatan :**

1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

**Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah didukung 7 (tujuh) sub kegiatan :**

1. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
6. Koordiansi perencanaan anggaran Pendapatan



7. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah

**Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah didukung 7 (tujuh) sub kegiatan :**

1. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
2. Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
3. Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
4. Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
5. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
6. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
7. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan



**Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah didukung 6 (enam) sub kegiatan :**

1. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
2. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota
4. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
5. Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota
6. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota

**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung 4 (empat) sub kegiatan :**

1. Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah
2. Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah
3. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
4. Pengelolaan dana darurat dan mendesak



**Kegiatan Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah didukung 3 (tiga) sub kegiatan :**

1. Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota
3. Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah

**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung oleh 1 (satu) kegiatan :**

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung 8 (delapan) sub kegiatan :**

1. Penyusunan standar harga
2. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
3. Penatausahaan barang milik daerah
4. Pengamanan barang milik daerah
5. Penilaian Barang milik Daerah
6. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
7. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

*Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung*  
*Tahun 2025*





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan tupoksi masing-masing bidang dan sub bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BKAD Kota Bandar Lampung (terlampir).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

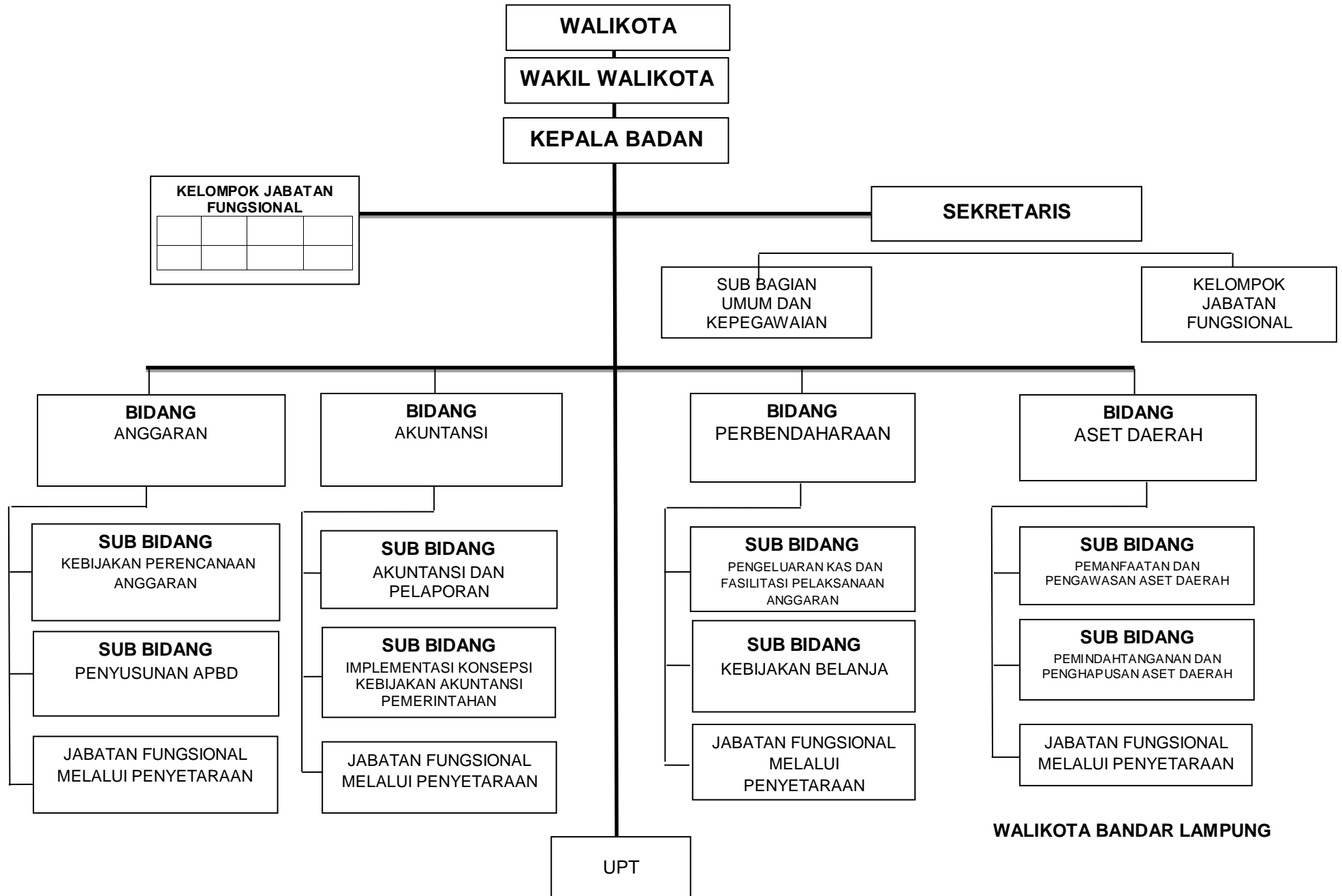
**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**EVA DWIANA**

*Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung*  
Tahun 2025



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

**EVA DWIANA**

TABEL T-C.29 : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN S.D 2024  
KOTA BANDAR LAMPUNG.

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	
			Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023
5	02	01	2	01	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	02	01	2	02	0001
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah</b>																
<b>Keuangan</b>																
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>																
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan		Absolute	98	%			98	%	98	%	100%	98	%	98	%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Absolute	100	%			100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Absolute	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Absolute	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Absolute	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Absolute	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar realisasi kinerja SKPD		Absolute	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	9	Laporan	60%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Absolute	25	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	15	Laporan	60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Absolute	100	%			100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib		Absolute	100	%			100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		Absolute	100	%			100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Absolute	692	orang/bulan	127	orang/bulan	127	orang/bulan	127	orang/bulan	100%	137	orang/bulan	391	orang/bulan	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		
							Target Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)			Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024		
							6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
5 02 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Absolute	7440	Dokumen	1240	Dokumen	1240	Dokumen	1240	Dokumen	100%	1240	Dokumen	3720	Dokumen	50%
5 02 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Absolute	78	Laporan	29	Laporan	39	Laporan	39	Laporan	100%	13	Laporan	81	Laporan	104%
5 02 01 2 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Absolute</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>100%</b>
5 02 01 2 03 0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Absolute	12	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	0	Dokumen	12	Dokumen	100%
5 02 01 2 05	<b>Administrasi Kepewajiban Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Absolute</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Tahun</b>	<b>100%</b>	<b>Tahun</b>	<b>100%</b>
5 02 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Absolute	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	100%
5 02 01 2 05 0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan yugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Absolute	42	orang	14	orang	7	%	7	%	100	7	%	28	%	67%
5 02 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</b>	<b>Absolute</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
5 02 01 2 06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Absolute	18	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100%	3	paket	9	paket	50%
5 02 01 2 06 0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Absolute	24	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100%	4	paket	12	paket	50%
5 02 01 2 06 0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Absolute	36	paket	6	paket	6	paket	6	paket	100%	6	paket	18	paket	50%
5 02 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Absolute	42	paket	7	paket	7	paket	7	paket	100%	7	paket	21	paket	50%
5 02 01 2 06 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Absolute	54	paket	9	paket	9	paket	9	paket	100%	9	paket	27	paket	50%
5 02 01 2 06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Absolute	36	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	paket	100%	6	paket	18	paket	50%
5 02 01 2 06 0008	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Absolute	60	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Dokumen	100%	10	Dokumen	30	Dokumen	50%
5 02 01 2 06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Absolute	48	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	24	Laporan	50%
5 02 01 2 06 0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Absolute	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	50%
5 02 01 2 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor</b>	<b>Absolute</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>Dokumen</b>	<b>98</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)			
							Target Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
							6	7	8	9	10	11			12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
5 02 01 2 07 0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Absolute	48	unit	16	unit	8	unit	8	unit	100%	8	unit	32	unit	67%	
5 02 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Absolute	30	unit	10	unit	5	unit	5	unit	100%	5	unit	20	unit	67%	
5 02 01 2 08	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD</b>	<b>Absolute</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	
5 02 01 2 08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%	
5 02 01 2 08 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%	
5 02 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Inventaris kantor yang tersedia</b>	<b>Absolute</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	
5 02 01 2 09 0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Absolute	6	unit	1	unit	3	unit	3	unit	100%	1	unit	5	unit	83%	
5 02 01 2 09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Absolute	108	unit	36	unit	18	unit	18	unit	100%	18	unit	72	unit	67%	
5 02 01 2 09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Absolute	60	unit	10	unit	10	unit	10	unit	100%	10	unit	30	unit	50%	
5 02 01 2 09 0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /	Absolute	6	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	50%	
5 02 02	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK atas LKPD</b>	<b>Absolute</b>	<b>WTP</b>	<b>Predikat</b>	<b>Predikat</b>	<b>WDP</b>	<b>Predikat</b>	<b>WDP</b>	<b>Predikat</b>	<b>100%</b>	<b>WTP</b>	<b>Predikat</b>	<b>WTP</b>	<b>Predikat</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P</b>	<b>Absolute</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan</b>	<b>Absolute</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>		
5 02 02 2 01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>Absolute</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>		
5 02 02 2 01 0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%	
5 02 02 2 01 0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%	
5 02 02 2 01 0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		
							Target Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)			Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024		
							6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)				11=(10/4)	
5 02 02 2 01 0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%
5 02 02 2 01 0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%
5 02 02 2 01 0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Absolute	18	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	12	Dokumen	67%
5 02 02 2 01 0011	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Absolute	18	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	12	Dokumen	67%
6 02 02 2 02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentasekoordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	<b>Absolute</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
5 02 02 2 02 0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Absolute	72	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	6	%	100%	6	%	24	%	33%
5 02 02 2 02 0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Absolute	18	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	12	Dokumen	67%
5 02 02 2 02 0005	Koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Absolute	72	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	6	%	100%	6	%	24	%	33%
5 02 02 2 02 0006	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan an pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Absolute	30	Laporan	10	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	20	Laporan	67%
5 02 02 2 02 0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Absolute	72	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	%	100%	6	%	42	Laporan	58%
5 02 02 2 02 0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Absolute	324	Dokumen	108	Dokumen	54	Dokumen	54	Dokumen	100%	54	%	216	%	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)			
						Target Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024			
			4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5 02 02 2 02 0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub-kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub-kegiatan	Absolute	90	Dokumen		Dokumen	45	Dokumen	45	Dokumen	100%	15	Dokumen	60	Dokumen	67%
5 02 02 2 03 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Absolute	WTP	Predikat		Predikat	WTP	Predikat	WDP	Predikat	75%	WTP	Predikat	WTP	Predikat	100%
5 02 02 2 03 03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Absolute	84	Laporan	28	Laporan	14	Laporan	14	Dokumen	100%	14	Dokumen	56	Dokumen	67%
5 02 02 2 03 04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
5 02 02 2 03 05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Absolute	30	Dokumen	10	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	20	Dokumen	67%
5 02 02 2 03 07	Koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Absolute	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	%	100%	1	%	4	%	67%
5 02 02 2 03 11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Absolute	972	orang	324	orang	162	orang	162	Laporan	100%	162	Laporan	648	Laporan	67%
5 02 02 2 03 12	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	Absolute	192	Lembaga	64	Lembaga	32	Lembaga	32	Laporan	100%	32	Laporan	128	Laporan	67%
5 02 02 2 04 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat	Absolute	100	%		%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
5 02 02 2 04 0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
5 02 02 2 04 0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Absolute	36	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	24	Laporan	67%
5 02 02 2 04 0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Absolute	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
5 02 02 2 04 0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Absolute	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
5 02 02 2 05 05	Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Absolute	100	%		%	100%		100%		100%	100%		WTP		100%
5 02 02 2 05 0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Absolute	24	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)				
							Target Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
							6	7	8=(7/6)	9				10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5 02 02 2 05 0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Absolute	72	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	48	Dokumen	67%
5 02 02 2 05 0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Absolute	180	orang	60	orang	30	orang	30	orang	100%	30	orang	120	orang	67%
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	Absolute	100	%	%	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
		Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	Absolute	100	%	%	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
5 02 03 2 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	Absolute	100	%	%	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
5 02 03 2 01 0001	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Absolute	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
5 02 03 2 01 0003	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Absolute	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
5 02 03 2 01 0005	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
5 02 03 2 01 0007	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	Absolute	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
5 02 03 2 01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Absolute	4	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	2	Laporan	50%
5 02 03 2 01 0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Absolute	120	Dokumen	40	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	80	Dokumen	67%
5 02 03 2 01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Absolute	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	67%
5 02 03 2 01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Absolute	4	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	2	Laporan	50%

Bandar Lampung, 2024  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Bandar Lampung

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA  
NIP. 19741007 200501 1 006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

381

762

7440

78

2480

26

1488

1240

310

930

4

10.66667

8

8



6

3

108

54

12

84

972

192

324

4





**Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kota Bandar Lampung**

Nama OPD : BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah												
5	02	Keuangan											
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Bandar Lampung	98%	136,262,512,537.00	1%	98%	143,075,638,163.85			
5	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Bandar Lampung	100%	644,182,421.00	APBD	100%	676,391,542.05	
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	136,179,514.00	APBD	2 dokumen	142,988,489.70
5	02	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	62,071,414.00	APBD	1 dokumen	65,174,984.70
6	02	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	59,194,228.00	APBD	1 dokumen	62,153,939.40
7	02	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	70,952,058.00	APBD	1 dokumen	74,499,660.90
8	02	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	64,174,243.00	APBD	1 dokumen	67,382,955.15
5	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bandar Lampung	3 laporan	124,015,631.00	APBD	3 laporan	130,216,412.55
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bandar Lampung	5 laporan	127,595,333.00	APBD	5 laporan	133,975,099.65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	Bandar Lampung	100%	128,767,116,110.00	APBD		100%	135,205,471,915.50
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bandar Lampung	127 orang/bulan	128,031,253,479.00	APBD		137 orang/bulan	134,432,816,152.95
5	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bandar Lampung	1240 Dokumen	430,114,778.00	APBD		1240 Dokumen	451,620,516.90
5	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Bandar Lampung	13 laporan	305,747,853.00	APBD		13 laporan	321,035,245.65
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bandar Lampung	100%	288,037,608.00	APBD		100%	302,439,488
5	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Bandar Lampung	1 paket	100,000,000.00	APBD		1 paket	105,000,000.00
5	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bandar Lampung	7 orang	188,037,608.00	APBD		7 orang	197,439,488.40
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Bandar Lampung	98%	1,516,422,224.00	APBD		98%	1,592,243,335.20
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	3 paket	115,003,087.00	APBD		3 paket	120,753,241.35
5	02	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	4 paket	180,006,938.00	APBD		4 paket	189,007,284.90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
		(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)			
5	02	01	2	06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Bandar Lampung	6 paket	78,310,194.00	APBD		6 paket	82,225,703.70
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlahpaket bahan logistik kantor yang disediakan	Bandar Lampung	7 paket	78,000,000.00	APBD		7 paket	81,900,000.00
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Bandar Lampung	9 paket	188,707,290.00	APBD		9 paket	198,142,654.50
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bandar Lampung	6 dokumen	38,040,000.00	APBD		6 dokumen	39,942,000.00
5	02	01	2	06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Bandar Lampung	10 laporan	162,000,000.00	APBD		10 laporan	170,100,000.00
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bandar Lampung	8 laporan	276,147,935.00	APBD		8 laporan	289,955,331.75
5	02	01	2	06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	400,206,780.00	APBD		1 dokumen	420,217,119.00
5	02	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>98%</b>	<b>502,540,674.00</b>	<b>APBD</b>		<b>98%</b>	<b>527,667,707.70</b>
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Bandar Lampung	8 unit	256,323,138.00	APBD		8 unit	269,139,294.90
5	02	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Bandar Lampung	5 unit	246,217,536.00	APBD		5 unit	258,528,412.80
5	02	01	2	08		<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>98%</b>	<b>3,971,626,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>98%</b>	<b>4,170,207,300.00</b>
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	174,810,000.00	APBD		1 laporan	183,550,500.00
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	3,796,816,000.00	APBD		1 laporan	3,986,656,800.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inventaris kantor yang tersedia	Bandar Lampung	98%	572,587,500.00	APBD		98%	601,216,875.00
5	02	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bandar Lampung	1 unit	52,430,000.00	APBD		1 unit	55,051,500.00
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Bandar Lampung	18 unit	313,957,500.00	APBD		18 unit	329,655,375.00
5	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bandar Lampung	10 unit	78,500,000.00	APBD		10 unit	82,425,000.00
5	02	01	2	09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bandar Lampung	1 unit	127,700,000.00	APBD		1 unit	134,085,000.00
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Bandar Lampung	WTP	66,677,876,164.00	APBD		WTP	70,011,769,972.20
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Bandar Lampung	100%	4,680,235,738.00	APBD		100%	4,914,247,524.90
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bandar Lampung	2 dokumen	745,820,815.00	APBD		2 dokumen	783,111,855.75
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Bandar Lampung	2 dokumen	442,312,817.00	APBD		2 dokumen	464,428,457.85
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Bandar Lampung	2 Dokumen	593,807,231.00	APBD		2 Dokumen	623,497,592.55

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Bandar Lampung	2 Dokumen	614,521,438.00	APBD		2 Dokumen	645,247,509.90
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Bandar Lampung	2 Dokumen	479,080,311.00	APBD		2 Dokumen	503,034,326.55
5	02	02	2	01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Bandar Lampung	3 dokumen	1,125,510,229.00	APBD		3 dokumen	1,181,785,740.45
5	02	02	2	01	0011	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Bandar Lampung	3 dokumen	679,182,897.00	APBD		3 dokumen	713,142,041.85
5	02	02	2	02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentasekoordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>5,923,573,734.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,219,752,420.70</b>
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	1,604,240,000.00	APBD		12 dokumen	1,684,452,000.00
5	02	02	2	02	0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Bandar Lampung	3 dokumen	1,329,175,133.00	APBD		3 dokumen	1,395,633,889.65
5	02	02	2	02	0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Bandar Lampung	12 dokumen	690,000,000.00	APBD		12 dokumen	724,500,000.00
5	02	02	2	02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan an pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Bandar Lampung	5 laporan	675,113,555.00	APBD		5 laporan	708,869,232.75
5	02	02	2	02	0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Bandar Lampung	12 dokumen	114,565,046.00	APBD		12 dokumen	120,293,298.30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		
5	02	02	2	02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Bandar Lampung	54 dokumen	915,480,000.00	APBD		54 dokumen	961,254,000.00
5	02	02	2	02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Bandar Lampung	15 dokumen	595,000,000.00	APBD		15 dokumen	624,750,000.00
5	02	02	2	03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK atas LKPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>WTP</b>	<b>1,121,312,539.00</b>	<b>APBD</b>		<b>WTP</b>	<b>1,177,378,165.95</b>
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Bandar Lampung	14 laporan	211,304,312.00	APBD		14 laporan	221,869,527.60
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	Bandar Lampung	1 laporan	155,400,582.00	APBD		1 laporan	163,170,611.10
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Bandar Lampung	5 dokumen	263,006,373.00	APBD		5 dokumen	276,156,691.65
5	02	02	2	03	0007	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	82,143,930.00	APBD		1 dokumen	86,251,126.50
5	02	02	2	03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Bandar Lampung	162 orang	348,512,515.00	APBD		162 orang	365,938,140.75
5	02	02	2	03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	Bandar Lampung	32 lembaga	60,944,827.00	APBD		32 lembaga	63,992,068.35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
		(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)			
5	02	02	2	04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>53,033,814,978.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>55,685,505,726.90</b>
5	02	02	2	04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Bandar Lampung	1 laporan	58,362,221.00	APBD		1 laporan	61,280,332.05
5	02	02	2	04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Bandar Lampung	6 laporan	10,675,516,689.00	APBD		6 laporan	11,209,292,523.45
5	02	02	2	04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Bandar Lampung	12 laporan	24,299,936,068.00	APBD		12 laporan	25,514,932,871.40
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Bandar Lampung	12 laporan	18,000,000,000.00	APBD		12 laporan	18,900,000,000.00
5	02	02	2	05		<b>Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1,918,939,175.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,014,886,133.75</b>
5	02	02	2	05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Bandar Lampung	4 dokumen	217,622,541.00	APBD		4 dokumen	228,503,668.05
5	02	02	2	05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	299,428,474.00	APBD		12 dokumen	314,399,897.70
5	02	02	2	05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Bandar Lampung	30 orang	1,401,888,160.00	APBD		30 orang	1,471,982,568.00
5	02	03				<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>2,680,558,468.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,814,586,390.95</b>
							<b>Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
5	02	03	2	01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>2,680,558,468.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,814,586,390.95</b>
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Bandar Lampung	1 dokumen	194,208,663.00	APBD		1 dokumen	203,919,096.15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 02 01 2 03 0003	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bandar Lampung	2 Dokumen	130,160,873.00	APBD		2 Dokumen	136,668,916.65
5 02 03 2 01 0005	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 laporan	60,112,850.00	APBD		1 laporan	63,118,492.50
5 02 03 2 01 0007	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 laporan	960,659,566.00	APBD		1 laporan	1,008,692,544.30
5 02 03 2 01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Bandar Lampung	1 laporan	109,038,798.00	APBD		1 laporan	114,490,737.90
5 02 03 2 01 0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Bandar Lampung	20 dokumen	436,794,647.00	APBD		20 dokumen	458,634,379.35
5 02 03 2 01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	677,484,149.00	APBD		2 dokumen	711,358,356.00
5 02 03 2 01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Bandar Lampung	1 laporan	112,098,922.00	APBD		1 dokumen	117,703,868.10
<b>JUMLAH</b>						<b>205,620,947,169.00</b>			<b>215,901,994,527.00</b>

Bandar Lampung, 2024  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Bandar Lampung,

**Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt.,CGAE., CA**  
NIP. 19741007 200501 1 006

















**Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kota Bandar Lampung**

Nama OPD : BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah													
5	02													
5	02	01												
5	02	01	2	01										
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	136,179,514.00	APBD		2 dokumen	142,988,490.00
5	02	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	62,071,414.00	APBD		1 dokumen	65,174,985.00
6	02	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	59,194,228.00	APBD		1 dokumen	62,153,940.00
7	02	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	70,952,058.00	APBD		1 dokumen	74,499,661.00
8	02	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	64,174,243.00	APBD		1 dokumen	67,382,956.00
5	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bandar Lampung	3 laporan	124,015,631.00	APBD		3 laporan	130,216,413.00
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bandar Lampung	5 laporan	127,595,333.00	APBD		5 laporan	133,975,100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	Bandar Lampung	100%	128,767,116,110.00	APBD		100%	135,205,471,916.00
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bandar Lampung	127 orang/bulan	128,031,253,479.00	APBD		137 orang/bulan	134,432,816,153.00
5	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bandar Lampung	1240 Dokumen	430,114,778.00	APBD		1240 Dokumen	451,620,517.00
5	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Bandar Lampung	13 laporan	305,747,853.00	APBD		13 laporan	321,035,246.00
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bandar Lampung	100%	288,037,608.00	APBD		100%	302,439,489
5	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Bandar Lampung	1 paket	100,000,000.00	APBD		1 paket	105,000,000.00
5	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bandar Lampung	7 orang	188,037,608.00	APBD		7 orang	197,439,489.00
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Bandar Lampung	98%	1,516,422,224.00	APBD		98%	1,592,243,337.00
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	3 paket	115,003,087.00	APBD		3 paket	120,753,242.00
5	02	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	4 paket	180,006,938.00	APBD		4 paket	189,007,285.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
		(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)			
5	02	01	2	06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Bandar Lampung	6 paket	78,310,194.00	APBD		6 paket	82,225,704.00
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlahpaket bahan logistik kantor yang disediakan	Bandar Lampung	7 paket	78,000,000.00	APBD		7 paket	81,900,000.00
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Bandar Lampung	9 paket	188,707,290.00	APBD		9 paket	198,142,655.00
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bandar Lampung	6 dokumen	38,040,000.00	APBD		6 dokumen	39,942,000.00
5	02	01	2	06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Bandar Lampung	10 laporan	162,000,000.00	APBD		10 laporan	170,100,000.00
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bandar Lampung	8 laporan	276,147,935.00	APBD		8 laporan	289,955,332.00
5	02	01	2	06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	400,206,780.00	APBD		1 dokumen	420,217,119.00
5	02	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>98%</b>	<b>502,540,674.00</b>	<b>APBD</b>		<b>98%</b>	<b>527,667,708.00</b>
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Bandar Lampung	8 unit	256,323,138.00	APBD		8 unit	269,139,295.00
5	02	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Bandar Lampung	5 unit	246,217,536.00	APBD		5 unit	258,528,413.00
5	02	01	2	08		<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>98%</b>	<b>3,971,626,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>98%</b>	<b>4,170,207,300.00</b>
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	174,810,000.00	APBD		1 laporan	183,550,500.00
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	3,796,816,000.00	APBD		1 laporan	3,986,656,800.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inventaris kantor yang tersedia	Bandar Lampung	98%	572,587,500.00	APBD		98%	601,216,875.00
5	02	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bandar Lampung	1 unit	52,430,000.00	APBD		1 unit	55,051,500.00
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Bandar Lampung	18 unit	313,957,500.00	APBD		18 unit	329,655,375.00
5	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bandar Lampung	10 unit	78,500,000.00	APBD		10 unit	82,425,000.00
5	02	01	2	09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bandar Lampung	1 unit	127,700,000.00	APBD		1 unit	134,085,000.00
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Bandar Lampung	WTP	66,677,876,164.00	APBD		WTP	70,011,769,972.00
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Bandar Lampung	100%		APBD		100%	
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Bandar Lampung	100%	4,680,235,738.00	APBD		100%	4,914,247,526.00
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bandar Lampung	2 dokumen	745,820,815.00	APBD		2 dokumen	783,111,856.00
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Bandar Lampung	2 dokumen	442,312,817.00	APBD		2 dokumen	464,428,458.00
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Bandar Lampung	2 Dokumen	593,807,231.00	APBD		2 Dokumen	623,497,593.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		(1)				(2)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Bandar Lampung	2 Dokumen	614,521,438.00	APBD		2 Dokumen	645,247,510.00
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Bandar Lampung	2 Dokumen	479,080,311.00	APBD		2 Dokumen	503,034,327.00
5	02	02	2	01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Bandar Lampung	3 dokumen	1,125,510,229.00	APBD		3 dokumen	1,181,785,740.00
5	02	02	2	01	0011	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Bandar Lampung	3 dokumen	679,182,897.00	APBD		3 dokumen	713,142,042.00
5	02	02	2	02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentasekoordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>5,923,573,734.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,219,752,420.00</b>
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	1,604,240,000.00	APBD		12 dokumen	1,684,452,000.00
5	02	02	2	02	0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Bandar Lampung	3 dokumen	1,329,175,133.00	APBD		3 dokumen	1,395,633,890.00
5	02	02	2	02	0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Bandar Lampung	12 dokumen	690,000,000.00	APBD		12 dokumen	724,500,000.00
5	02	02	2	02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan an pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Bandar Lampung	5 laporan	675,113,555.00	APBD		5 laporan	708,869,232.00
5	02	02	2	02	0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Bandar Lampung	12 dokumen	114,565,046.00	APBD		12 dokumen	120,293,298.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		
5	02	02	2	02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Bandar Lampung	54 dokumen	915,480,000.00	APBD		54 dokumen	961,254,000.00
5	02	02	2	02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Bandar Lampung	15 dokumen	595,000,000.00	APBD		15 dokumen	624,750,000.00
5	02	02	2	03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK atas LKPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>WTP</b>	<b>1,121,312,539.00</b>	<b>APBD</b>		<b>WTP</b>	<b>1,177,378,166.00</b>
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Bandar Lampung	14 laporan	211,304,312.00	APBD		14 laporan	221,869,528.00
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	Bandar Lampung	1 laporan	155,400,582.00	APBD		1 laporan	163,170,611.00
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Bandar Lampung	5 dokumen	263,006,373.00	APBD		5 dokumen	276,156,692.00
5	02	02	2	03	0007	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	82,143,930.00	APBD		1 dokumen	86,251,126.00
5	02	02	2	03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Bandar Lampung	162 orang	348,512,515.00	APBD		162 orang	365,938,141.00
5	02	02	2	03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	Bandar Lampung	32 lembaga	60,944,827.00	APBD		32 lembaga	63,992,068.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	
5	02	02	2	04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>53,033,814,978.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>55,685,505,726.00</b>
5	02	02	2	04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Bandar Lampung	1 laporan	58,362,221.00	APBD		1 laporan	61,280,332.00
5	02	02	2	04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Bandar Lampung	6 laporan	10,675,516,689.00	APBD		6 laporan	11,209,292,523.00
5	02	02	2	04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Bandar Lampung	12 laporan	24,299,936,068.00	APBD		12 laporan	25,514,932,871.00
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Bandar Lampung	12 laporan	18,000,000,000.00	APBD		12 laporan	18,900,000,000.00
5	02	02	2	05		<b>Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1,918,939,175.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,014,886,134.00</b>
5	02	02	2	05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Bandar Lampung	4 dokumen	217,622,541.00	APBD		4 dokumen	228,503,668.00
5	02	02	2	05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	299,428,474.00	APBD		12 dokumen	314,399,898.00
5	02	02	2	05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Bandar Lampung	30 orang	1,401,888,160.00	APBD		30 orang	1,471,982,568.00
5	02	03				<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>2,680,558,468.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,814,586,385.00</b>
							<b>Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
5	02	03	2	01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>2,680,558,468.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,814,586,385.00</b>
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Bandar Lampung	1 dokumen	194,208,663.00	APBD		1 dokumen	203,919,096.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 02 01 2 03 0003	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bandar Lampung	2 Dokumen	130,160,873.00	APBD		2 Dokumen	136,668,917.00
5 02 03 2 01 0005	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 laporan	60,112,850.00	APBD		1 laporan	63,118,490.00
5 02 03 2 01 0007	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 laporan	960,659,566.00	APBD		1 laporan	1,008,692,540.00
5 02 03 2 01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Bandar Lampung	1 laporan	109,038,798.00	APBD		1 laporan	114,490,738.00
5 02 03 2 01 0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Bandar Lampung	20 dokumen	436,794,647.00	APBD		20 dokumen	458,634,380.00
5 02 03 2 01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	677,484,149.00	APBD		2 dokumen	711,358,356.00
5 02 03 2 01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Bandar Lampung	1 laporan	112,098,922.00	APBD		1 dokumen	117,703,868.00
<b>JUMLAH</b>						<b>205,620,947,169.00</b>			<b>215,901,994,527.00</b>

Bandar Lampung, 2024  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Bandar Lampung,

**Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt.,CGAE., CA**  
NIP. 19741007 200501 1 006















